

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah di dasari oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu tentang Pemerintah Daerah. Daerah di beri kewenangan dan tanggung jawab yang lebih dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan masyarakat. Tujuan dari pada otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Di Indonesia otonomi daerah sangat penting bagi daerah otonom untuk mengembangkan potensi daerahnya. Tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Asas desentralisasi sangat dibutuhkan oleh daerah otonom.

Selain kedua UU tersebut ada hukum yang melandasi pelaksanaan pengelolaan keuangan pada pemeritah daerah yaitu surat Al- Qur'an dan hadits sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 188).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa:58).

عِيْتِهَعْنَلُو مَسْؤُ هُو و عار مما لإأ (م سد لمهاور)

Artinya: “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyat.” (H. R. Muslim).

Dari kedua ayat tersebut serta hadits diatas pada hakekatnya pemerintah sebagai khalifah dari rakyatnya memiliki amanat dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan. Dari Surat alquran dan hadits di atas harapanya pemerintah menggunakan anggaran untuk urusan rakyat, menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonom. Dengan adanya otonomi daerah, permasalahan di daerah lebih efektif dan efisien apabila urusan-urusan di daerah ditangani oleh pemerintah lokal. Kemandirian suatu daerah sangat diperlukan karena suatu daerah yang mandiri berarti tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat sangat rendah. Daerah yang mandiri dapat dilihat dari kinerja daerah dalam mengelola keuangan.

Salah satu bentuk kewenangan yang diberikan pemerintah secara penuh terhadap daerah otonom untuk mengelola dalam berbagai aspek diantaranya adalah aspek keuangan yang di atur dalam UU No. 12 Tahun 2008, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maka daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya masing –masing dalam membiayai rumah tangganya sendiri serta untuk pembangunan yang berkelanjutan. Ciri utama kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari keuangan daerah dimana kemampuan daerah mengelola keuangan daerah artinya otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber – sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya (Aryanti, 2015).

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu

proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber-sumber yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut sebagai wujud dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Arsyad dalam Azzumar, 2011).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah guna menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD sebagai bagian dari penerimaan daerah merupakan sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memajukan pembangunan daerah. Selain itu PAD juga sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari daerah itu sendiri yang terdiri dari ; (1) hasil pajak daerah, (2) hasil dari retribusi daerah, (3) hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan berbagai pos pendapatan sumber dana yang tersedia diharapkan dapat menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh PAD maka semakin

tinggi pula kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerah.

Pemerintah daerah diuntut agar lebih bisa mandiri dalam mengelola hasil penerimaan yang bertujuan untuk membiayai pembangunan daerah, melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki agar pemerintah daerah bisa mendapatkan hasil yang optimal dari kekayaan yang dimiliki daerahnya. Setiap pemerintah daerah dapat meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri dengan meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Mardisamo, 2002).

Dilihat dari tabel 1.1 dibawah menunjukkan bahwa realisasi total pendapatan pemerintah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendapatan asli daerah yang terus meningkat dari tahun 2014 menuju tahun 2015 yang dipengaruhi seiring bertambahnya pajak, retribusi daerah dapat dicapai dengan mengoktimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil laba BUMD, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta

| No. | Jenis Pendapatan | 2014 | 2015 |
|-----|-------------------------------|---------------|---------------|
| 1. | Pendapatan Asli Daerah | 1.464.604.954 | 1.593.110.770 |
| | a. Pajak Daerah | 1.291.664.421 | 1.397.772.210 |
| | b. Retribusi Daerah | 44.595.094 | 45.811.954 |
| | c. Hasil Laba BUMD | 48.247.881 | 52.502.632 |
| | d. Lain-lain PAD yang sah | 80.097.558 | 97.023.974 |
| 2. | Dana Perimbangan | 1.013.811.389 | 1.021.886.268 |
| | a. Bagi Hasil Pajak | 70.324.849 | 52.873.389 |
| | b. Bagi Hasil Bukan Pajak | 6.431.380 | 9.388.517 |
| | c. Dana Alokasi Umum | 899.923.550 | 920.544.722 |
| | d. Dana Alokasi Khusus | 37.131.610 | 39.084.040 |
| 3. | Lain-lain pendapatan yang sah | 661.455.537 | 785.017.774 |

Sumber : BPS DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki luas wilayah kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya, yaitu 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan oleh pihak kerajaan yaitu pihak yang di pimpin oleh seorang Sultan dan Pakualam yang sekaligus menjabat sebagai gubernur dan wali gubernur. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari empat kabupaten yaitu kabupaten Bantul, kabupaten Sleman, kabupaten Gunung Kidul dan Kotamadya yaitu Kota Yogyakarta. Luas wilayah dan jumlah kabupaten/kota lebih sedikit dari pada provinsi lainnya di Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mengoptimalkan pembangunan di semua sektor sehingga dapat meningkatkan PAD.

Peningkatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dianggap sebagai modal secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas yang bersifat positif dan akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi (Pujiati,2008). Perkembangan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan kabupaten/kota dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di DIY
Tahun 2010-2016 (juta)

| Tahun | Kabupaten/Kota | | | | |
|-------|----------------|--------|-------------|--------|------------|
| | Kulonprogo | Bantul | Gunungkidul | Sleman | Yogyakarta |
| 2010 | 48190 | 90239 | 42521 | 163632 | 179423 |
| 2011 | 53752 | 128900 | 54462 | 226723 | 228833 |
| 2012 | 74028 | 166597 | 67050 | 301069 | 338839 |
| 2013 | 95991 | 224197 | 83472 | 455998 | 383052 |
| 2014 | 158800 | 357411 | 159304 | 573337 | 470634 |
| 2015 | 170822 | 390624 | 196099 | 643130 | 510548 |
| 2016 | 180273 | 404454 | 206278 | 717151 | 540504 |

Sumber : BPS DIY

Dari tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pendapatan yang berbeda. Pada Tahun 2016 dari 5 Kabupaten/Kota yang memberikan kontribusi terbesar yaitu Kabupaten Sleman dengan Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp.717.151.000 ribu. Sedangkan pendapatan yang terkecil yaitu dari Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp.180.273.000 ribu. Nilai realisasi pendapatan asli daerah yang tinggi menandakan bahwa daerah tersebut semakin mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat sehingga mempunyai keefektifan yang baik untuk menjalankan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Banyak hal yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah salah satunya yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dalam suatu daerah dapat meningkatkan penerimaan pemerintah untuk membiayai program-program pembangunan yang selanjutnya akan mendorong produktivitasnya. Apabila pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tersebut sangat baik maka kemungkinan daerah tersebut memiliki pendapatan daerah yang memadai sehingga dapat memberikan sumbangasih terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah atau suatu daerah. Suatu daerah akan mengalami pertumbuhan secara ekonomi hanya jika peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi didalam wilayahnya secara terukur. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di DIY
Tahun 2010-2016 (persen)

| Tahun | Kabupaten/Kota | | | | |
|-------|----------------|--------|-------------|--------|------------|
| | Kulonprogo | Bantul | Gunungkidul | Sleman | Yogyakarta |
| 2010 | 3.06 | 4.97 | 4.15 | 4.49 | 4.46 |
| 2011 | 4.23 | 5.07 | 4.52 | 5.42 | 5.84 |
| 2012 | 4.37 | 5.33 | 4.84 | 5.79 | 5.40 |
| 2013 | 4.87 | 5.46 | 4.97 | 5.89 | 5.47 |
| 2014 | 4.37 | 5.15 | 4.54 | 5.41 | 5.30 |
| 2015 | 4.64 | 5.00 | 4.82 | 5.41 | 5.09 |
| 2016 | 4.76 | 5.06 | 4.89 | 5.25 | 5.11 |

Sumber: BPS DIY

Dari tabel 1.3 diatas, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan Ekonomi Terbesar terjadi pada Kabupaten Sleman Tahun 2013 yaitu sebesar 5,89%. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi terkecil terjadi pada Tahun 2010 di Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar 3,06%.

Kemiskinan masih merupakan masalah yang dialami seluruh penjuru dunia. Masalah kemiskinan tidak hanya melibatkan negara-negara dunia ketiga maupun negara-negara berkembang. Hal ini karena disamping istilah kemiskinan berkaitan dengan orang yang tidak mampu membiayai hidupnya atau mencukupi hidupnya secara layak namun juga berkaitan dengan adanya ketimpangan diantara penduduk yang berpenghasilan tinggi dengan penduduk yang berpenghasilan rendah (Hudiyanto, 2014).

Kemiskinan juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah karena kemiskinan sesuatu hal yang tidak dapat dipungkiri dalam sebuah negara. Jika kemiskinan pada suatu daerah tertinggi maka pasti akan berpengaruh terhadap pendapatan suatu daerah. Hal ini karena jika pendapatan perkapita masyarakat sedikit nantinya masyarakat tidak bisa membayar pajak dan pungutan-pugutan lainnya. Akan tetapi jika tingkat kemiskinan akan menurun jika inflasi cukup besar.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di DIY
Tahun 2010-2016 (jiwa)

| Tahun | Kabupaten/Kota | | | | |
|-------|----------------|--------|-------------|--------|------------|
| | Kulonprogo | Bantul | Gunungkidul | Sleman | Yogyakarta |
| 2010 | 90100 | 146900 | 148700 | 117000 | 37800 |
| 2011 | 92800 | 159400 | 157100 | 117300 | 37700 |
| 2012 | 92400 | 158800 | 156500 | 116800 | 37600 |
| 2013 | 86500 | 156600 | 152400 | 110800 | 35600 |
| 2014 | 84700 | 153500 | 148400 | 110400 | 35600 |
| 2015 | 88100 | 160200 | 155000 | 111000 | 36000 |
| 2016 | 84340 | 142760 | 139150 | 96630 | 32060 |

Sumber: BPS DIY

Tabel 1.4 diatas menunjukkan tingkat kemiskinan menurut kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2010-2016. Terjadi fluktuasi perkembangan tingkat kemiskinan selama tujuh tahun terakhir di kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana distribusi penduduk miskin pada setiap daerah menunjukkan jumlah yang tidak merata. Selama kurun waktu 7 tahun terakhir rata-rata jumlah penduduk miskin terbanyak ada pada kabupaten Bantul sebesar 154.022 jiwa, kemudian disusul kabupaten Gunungkidul dengan jumlah penduduk miskin 151.035 jiwa. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah penduduk miskin setiap tahunnya mengalami kenaikan pada tahun 2011 dan merata pada setiap daerah, kemudian jumlah penduduk miskin berkurang cukup signifikan sampai tahun 2014, dimana pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan.

Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi suatu Negara, terutama pemerintah daerah tempat obyek wisata itu berada, menurut UU Kepariwisata No. 10 Tahun 2009. Pariwisata adalah suatu

perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud tidak untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tapi hanya semata untuk menikmati perjalanan tersebut untuk mencapai kepuasan.

Letak Daerah Istimewa Yogyakarta yang sangat strategis dan banyak menyimpan kekayaan alam khususnya sektor swasta dapat menjadi kekuatan atau modal bagi daerah untuk menyumbangkan sumber daya yang ada serta memaksimalkan sektor-sektor yang dapat mendorong terjadinya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta selain terkenal dengan kota perjuangan, kebudayaan dan pendidikan juga dikenal dengan keindahan alamnya yang mampu menarik wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke objek wisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Banyak tempat wisata yang menarik untuk ditawarkan di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti wisata alam, wisata bahari dan obyek wisata buatan. Dengan banyaknya objek wisata ini dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian sektor pariwisata. Dengan berkembangnya sektor pariwisata ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satunya jumlah wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara dapat meningkat setiap tahunnya.

Tabel 1.5
Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2014-2016

| Tahun | Wisatawan Domestik | Wisatawan Mancanegara | Jumlah | Pertumbuhan (%) |
|-------|--------------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| 2014 | 3.091.967 | 254.213 | 3.346.180 | 17,91 |
| 2015 | 3.813.720 | 308.485 | 4.122.205 | 23,19 |
| 2016 | 4.194.261 | 335.313 | 4.229.298 | 10,37 |

Sumber : Dinas Pariwisata DIY (data diolah)

Dari tabel 1.5 di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan jumlah wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara di DIY tahun 2014-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara sebesar 3.346.180 orang dan pertumbuhan sebesar 17,91%, pada tahun 2015 sebesar 4.122.205 orang dan pertumbuhan sebesar 23,19%, terakhir pada tahun 2016 sebesar 4.229.298 orang dan pertumbuhan sebesar 10,37%. Jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), semakin banyak wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke obyek-obyek wisata maka akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

Adapun penelitian ini merujuk kepada beberapa studi yang menggunakan metode yang sama, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Desmawati & Zamzani, 2015) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa variabel pertumbuhan ekonomi signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Rozikin, 2016) yang bertujuan untuk Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Pulau Lombok menyimpulkan bahwa analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pulau Lombok.

Alasan peneliti memilih seluruh kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitian dikarenakan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai macam budaya baik dari kawasan wisata, maupun sumber daya alam yang dapat mendukung sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu prioritas pembangunan penggerak ekonomi masyarakat, sehingga berpotensi menghasilkan penerimaan daerah yang cukup besarguna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu setiap tahunnya Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidaklah sama di masing-masing daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN JUMLAH WISATAWAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2016”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dengan menurunkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Jumlah Wisatawan.
2. Penelitian ini dilakukan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta.
3. Penelitian ini hanya meneliti dari tahun 2010-2016.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dapat dituliskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta pada tahun 2010-2016?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kemiskinan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta pada tahun 2010-2016?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Yogyakarta pada tahun 2010-2016?

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai tolak ukur seberapa jauh pengetahuan dari penulis dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan yang terdapat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.